

EKSPANSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KALIMANTAN TENGAH: MEKANISME POLITIK DI BALIK KERUSAKAN EKOLOGI

Oleh

Katriani Puspita Ayu¹

¹Staff Pengajar Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Palangka Raya
email: klamey@gmail.com

ABSTRACT

The expansion of palm oil plantations creates various ecological problems in Central Kalimantan. Despite the fact that palm oil opening caused ecological damage, the mechanism behind palm oil expansion is vital to discuss. This study tries to identify the area expansion and investigate the political mechanism of palm oil development in Central Kalimantan. This research uses various literatures, articles and archives, which is organized and analysed to answer the research questions. The result shows that negative environmental impacts such as: forest loss, water pollutant, soil erosion, biodiversity loss and greenhouse gas emission occurred within the expansion of palm oil area. All ecological consequences are indirectly caused by the 'concession-trade' mechanism which exist in every level of authority. Competition among level of government in permit awarding has been the significant driver for palm oil expansion. Head of district that grants permit without regard to procedures and regulations has trade the permit for support in Pilkada campaign. Clientelism and patrons' relation between the palm oil company and district authority becomes the reason of palm oil expansion and contribute to the environment issues in Central Kalimantan.

Keywords: *Palm Oil Expansion, Political Mechanism, Clientelism And Patrons, Ecological Damage*

ABSTRAK

Perluasan perkebunan kelapa sawit menimbulkan berbagai masalah ekologi di Kalimantan Tengah. Terlepas dari kenyataan bahwa pembukaan kelapa sawit menyebabkan kerusakan ekologi, mekanisme di balik ekspansi kelapa sawit merupakan hal yang penting untuk dibahas. Kajian ini mencoba mengidentifikasi perluasan wilayah kelapa sawit dan mengkaji mekanisme politik yang menyebabkan ekspansi perkebunan sawit di Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan berbagai literatur, artikel dan arsip, yang disusun dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak negatif lingkungan seperti: hilangnya tutupan hutan, pencemaran air, erosi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati dan emisi gas rumah kaca terjadi dalam area perluasan perkebunan sawit. Semua konsekuensi ekologis secara tidak langsung disebabkan oleh mekanisme 'perdagangan konsesi' yang ada pada setiap tingkat otoritas. Persaingan antar tingkat pemerintahan dalam pemberian izin juga telah menjadi pendorong yang signifikan bagi ekspansi kelapa sawit. Kepala daerah yang memberikan izin tanpa memperhatikan prosedur dan peraturan telah memperdagangkan izin tersebut untuk

mendukung kampanye Pilkada. Klientelisme dan relasi patron antara perusahaan kelapa sawit dan otoritas kabupaten menjadi alasan ekspansi kelapa sawit dan berkontribusi pada masalah lingkungan di Kalimantan Tengah.

Kata kunci: *Ekspansi Kelapa Sawit, Mekanisme Politik, Klientelisme Dan Patron, Kerusakan Ekologi*

PENDAHULUAN

Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang terjadi di Indonesia merupakan isu yang bersisian dari berbagai aspek, baik dari aspek sosial, ekonomi maupun ekologi. Meningkatnya kebutuhan minyak nabati maupun crude palm oil (CPO) domestik dan internasional telah memicu produksi kepala sawit Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, produksi kelapa sawit baik minyak sawit maupun inti sawit pada tahun 2018 mencapai 48,68 juta ton, terdiri dari 40,57 juta ton CPO dan 8,11 juta ton palm kernel oil (PKO). Jumlah produksi tersebut berasal dari perkebunan sawit rakyat sebesar 16,8 juta ton (35%), perkebunan besar negara 2,49 juta ton (5%), dan perkebunan besar swasta 29,39 juta ton (60%)⁵. Perkembangan sawit di Indonesia saat ini menjadikannya industri dengan pemasukan tertinggi untuk devisa negara. Pada tahun 2019, devisa yang dihasilkan dari sektor kelapa sawit tercatat sebesar US\$20,2 miliar, meningkat sebesar \$1,6 miliar sejak tahun 2015⁶.

Selain itu, dari sudut pandang ekonomi, kelapa sawit juga telah menjadi satu faktor pendukung perekonomian masyarakat lokal. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, industri kelapa sawit ikut berperan besar dalam menyejahterakan masyarakat di perdesaan. Menurut data Kementerian Pertanian (2019), jumlah petani yang terlibat di bidang kelapa sawit sebanyak 2.673.810

orang, dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di perkebunan sebanyak 4.425.647 pekerja. Jumlah tersebut terdiri atas 4,0 juta (90,68 persen) pekerja di perkebunan sawit besar swasta nasional, 321 ribu (7,26 persen) pekerja perkebunan sawit besar negara, dan 91 ribu (2,07 persen) pekerja perkebunan sawit besar swasta asing⁷. Sawit menjadi penopang ekonomi masyarakat di daerah dan memberikan kesejahteraan bagi banyak petani lokal.

Bersamaan dengan bertumbuhnya permintaan akan kelapa sawit, bertambah pula luasan area yang dibutuhkan untuk perkebunan sawit. Data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian melaporkan pertumbuhan kebun sawit di Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 1980, luas lahan kebun sawit berkembang dari 295 ribu hektare menjadi 16,38 juta hektar hampir 40 tahun kemudian di tahun 2019⁸. Ekspansi sawit terbesar di Indonesia terjadi di Sumatera, Kalimantan dan Papua. Tren ekspansi perkebunan kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan merata, di mana luas deforestasi yang didorong oleh kelapa sawit menurun di Sumatera dan meningkat di Kalimantan sebagai akibat dari pergeseran produksi. Lebih dari 90 persen lahan yang cocok untuk budidaya kelapa sawit di Sumatera tidak lagi ditutupi oleh hutan alam, menunjukkan bahwa

5 <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2921/industri-kelapa-sawit-indonesia-menjaga-keseimbangan-aspek-sosial-ekonomi-dan-lingkungan>

6 <https://mutuinstitute.com/post/ekspor-kelapa-sawit-sebagai-penopang-ekonomi/>

7 <https://www.suara.com/bisnis/2021/06/15/152335/menaker-industri-kelapa-sawit-mampu-menyerap-tenaga-kerja?page=all>

8 <https://katadata.co.id/timrisetdanpublikasi/berita/5e9a4e6105c28/kelapa-sawit-sebagai-penopang-perekonomian-nasional>

ekspansi kelapa sawit di masa depan akan terus berlanjut terutama di kawasan non-hutan (Austin et al. 2017). Sementara berdasarkan analisis citra satelit selama periode 1990 hingga 2010 oleh Carlson et al (2012), tingkat deforestasi yang lebih tinggi di Kalimantan menunjukkan 90 persen lahan dikonversi menjadi kelapa sawit di kawasan hutan.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan dipercepat setelah tahun 2000 karena reformasi kebijakan di akhir 1990-an yang memfasilitasi iklim investasi dan sewa yang menarik (Bissonnette dan De Koninck, 2015). Menurut Potter (2008), Kalimantan menargetkan total area target satu juta hektar di empat provinsi seperti yang ditampilkan pada tabel 1, dengan cakupan yang cukup besar untuk ekspansi di tiap provinsinya. Tabel tersebut menunjukkan bahwa kelapa sawit di Kalimantan Tengah telah berkembang dari 343.323 hektar pada tahun 2003 menjadi 401.442 hektar setahun berikutnya dan menjadi provinsi dengan areal kelapa sawit terluas di seluruh Kalimantan.

Tabel 1

Luas wilayah Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan 2002-2004

Provinsi	2002	2003	Pertumbuhan 2002-2003	2004	Pertumbuhan 2003-2004
Kalimantan Barat	335,896	349,101	3.9%	367,619	5.3%
Kalimantan Tengah	295,946	343,323	16.0%	401,442	17.0%
Kalimantan Timur	132,174	158,786	20.0%	171,581	8.1%
Kalimantan Selatan	153,745	155,668	1.2%	172,650	10.9%
Total Kalimantan	2,427,761	2,606,752	7.4%	2,787,233	6.9%

Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka 2003; Kalimantan Tengah Dalam Angka 2003; Kalimantan Timur Dalam Angka 2003; Kalimantan Selatan 2003; Dinas Perkebunan Kalimantan Barat 2005; Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah 2005; Dinas Perkebunan Kalimantan Timur 2005; Dinas Kalimantan Selatan 2005 in Potter L (2008).

Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah (2015) mengklaim bahwa sektor kelapa sawit menargetkan 3,5 juta hektar kelapa sawit yang ditanam pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak lahan hutan maupun non-hutan diperlukan untuk ekspansi. Sejak tahun 2000 hingga 2008, Kalimantan Tengah kehilangan sekitar 0,9 juta hektar hutan (Broich et al., 2011). Sebagai provinsi terbesar ketiga di Indonesia dengan luas sekitar 15,3 juta hektar, Kalimantan Tengah memiliki perkebunan kelapa sawit hingga 1.156 m2 pada tahun 2014, dan menyumbang 11% dari total kelapa sawit Indonesia. Laju deforestasi dan pengembangan kelapa sawit di provinsi ini adalah salah satu yang paling tinggi di Indonesia (Broich et al. 2011; Kementerian Pertanian 2014).

Pertumbuhan ekonomi industri sawit Indonesia dan dampak ekologi yang di timbulkannya menjadikan isu deforestasi dan mekanisme di belakangnya menarik untuk diteliti. Dilema antara kemajuan ekonomi dan kondisi lingkungan yang rusak akibat ekspansi kebun sawit menjadi dua isu yang sama menariknya untuk di bahas dengan dukungan data dari berbagai sumber. Pesatnya kemajuan sawit sebagai penopang ekonomi seharusnya tidak berdampak merugikan bagi keberlangsungan ekologi. Kajian ini menitikberatkan pada dampak ekologis perluasan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah dan mekanisme politik yang melatarbelaknginya.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kajian literatur melalui buku, artikel jurnal, publikasi daring, surat kabar, maupun laporan dari berbagai instansi terkait. Artikel, jurnal dan buku yang dipilih mengedepankan tema ekspansi industri sawit, dampak perluasan perkebunan kelapa sawit dan analisis-analisis yang berkenaan dengan

perluasan kebun kelapa sawit di berbagai daerah di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan cara tabulasi data untuk kemudian di reduksi dengan menandai informasi-informasi yang sesuai dengan tema penelitian.

Selanjutnya, dilakukan kodifikasi dengan menggunakan kerangka coding yang dibuat berdasarkan konsep deforestasi dan ekologi politik. Analisis dibuat setelah melakukan interpretasi secara struktural terhadap data yang telah direduksi. Interpretasi data memperhatikan informasi, kata, kalimat, dan wacana dalam buku, artikel dan laporan ilmiah.

PEMBAHASAN

1. Laju Deforestasi

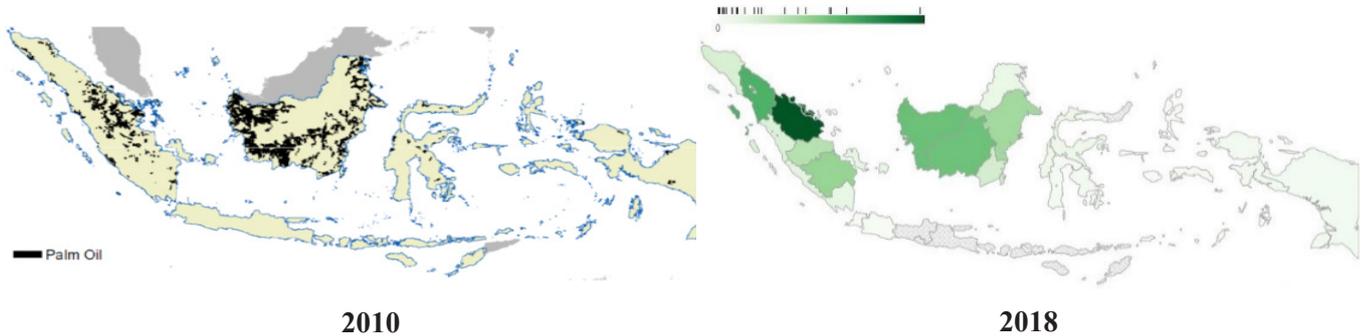
Laju deforestasi semakin meningkat sejak tahun 1970-an (FWI/GFW, 2002) dan pada tahun 2015, tutupan hutan telah berkurang setidaknya setengahnya yang terkait dengan aktivitas manusia (FWI/GFW, 2002; FAO, 2015; Suwarno 2016). Pembukaan hutan didorong oleh pertumbuhan penduduk, praktik budidaya, penebangan hutan, pemukiman kembali, pembangunan infrastruktur, kebakaran hutan, kebijakan, permintaan komoditas internasional dan faktor lingkungan global (Sunderlin dan Resosudarmo, 1996; Geist dan Lambin, 2002;; Prasetyo et al., 2011). Dengan demikian, deforestasi Indonesia juga berakhir di bawah tekanan perubahan sosial-ekonomi dan politik (FAO, 2010; Hansen et al., 2009; Margono et al., 2012)

Salah satu penyebab hilangnya tutupan hutan di Indonesia adalah perluasan perkebunan sawit untuk memenuhi kebutuhan domestik

maupun internasional. Kementerian Kehutanan Indonesia menunjukkan bahwa kelapa sawit memainkan peran penting dalam deforestasi di 32 persen kawasan hutan Indonesia. Wijaya et al., (2015) menganalisis data dari Global Forest Watch dan menunjukkan bahwa 55 persen kehilangan hutan terjadi di dalam wilayah konsesi legal, di mana penebangan pohon diperbolehkan sampai batas tertentu, tetapi 45 persen kehilangan hutan terjadi di luar wilayah konsesi legal. Hilangnya hutan di luar batas konsesi juga terjadi pada tingkat yang mengkhawatirkan yaitu 3,6 juta hektar sejak tahun 2000. Wijaya berpendapat bahwa hilangnya hutan di luar konsesi sebagian besar disebabkan oleh konversi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Namun tidak dapat di pungkiri, bahwa hilangnya hutan juga didorong oleh jaringan luas perkebunan kelapa sawit kecil yang dioperasikan oleh petani kecil yang menghasilkan hampir 40 persen stok sawit Indonesia. Saat ini, luas konsesi kelapa sawit milik swasta meningkat dari 1.083.823 hektar pada 1996 menjadi 6.153.277 hektar pada 2016, sedangkan BUMN masing-masing menguasai 126.804 hektar dan 755.787 hektar.

Gambar 1 menunjukkan konsesi kelapa sawit pada tahun 2010, di mana area hitam ditandai sebagai area kelapa sawit. Peta tersebut terdiri dari lahan yang ditanami dan yang belum ditanami, sebagian besar beroperasi dengan izin lokasi dan izin usaha perkebunan dan bukan izin hak guna lahan jangka panjang (Saxon dan Sheppard, 2010). Sedangkan gambar 2 merupakan peta sebaran konsesi sawit di Indonesia pada tahun 2018.

Peta Koneksi Sawit Indonesia 2010 dan 20

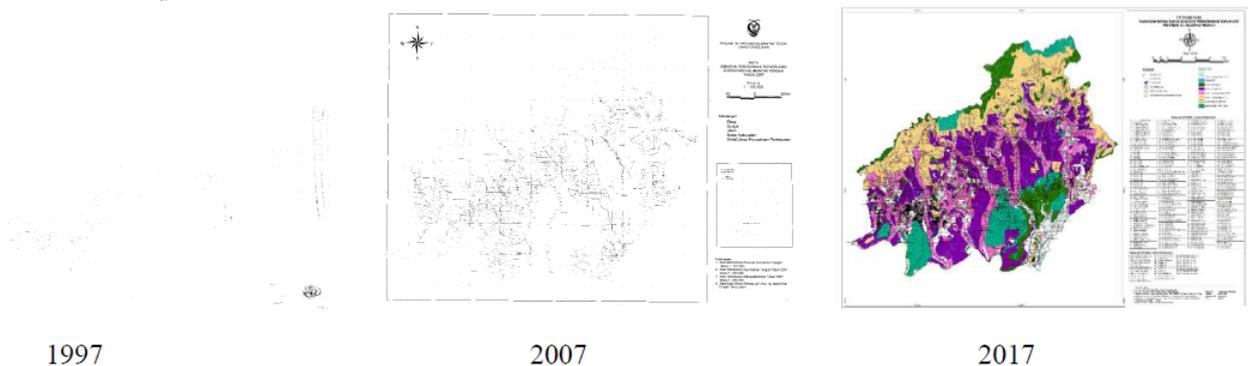


Sumber: Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, lahan sawit Indonesia mencapai 14,23 juta hektare. Angka tersebut terdiri atas 5,8 juta hektar perkebunan rakyat, 635 ribu hektar perkebunan besar negara, dan 7,88 juta hektar perkebunan besar swasta⁹. Kedua peta tersebut menunjukkan area yang ditumbuhi perkebunan kelapa sawit terluas berada di pulau Sumatera dan Kalimantan

Salah satu provinsi yang memiliki perkebunan sawit dalam jumlah yang luas

di Kalimantan Tengah, tiga kabupaten dengan perkebunan kelapa sawit terbesar adalah Kotawaringin Timur, Seruyan dan Kotawaringin Barat. Jika dilihat dari ketiga peta sebaran perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah di bawah ini, maka dapat dilihat pertumbuhan sejak 1997 menuju 2017 sangatlah pesat. Dari 119.270 hektar di tahun 1997 menjadi 1.520.936,83 hektar di tahun 2017.eta 2. Sebaran Perkebunan Kelapa Sawit Kalimantan Tengah 1997-2017



1997

2007

2017

Sumber: Peta 1997 & 2007 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Peta 2017 diolah menggunakan aplikasi GIS berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah oleh penulis

adalah Kalimantan Tengah yang sebagian besar kebun sawitnya dimiliki oleh perusahaan swasta. Di antara tiga belas kabupaten

2. Kerusakan Lingkungan Yang Disebabkan oleh Kelapa Sawit

Pemerintah Kalteng awalnya mengalokasikan sekitar empat juta hektare lahan untuk perkebunan. Dari total luasan tersebut, 23,45 persen sudah dibudidayakan,

⁹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/10/di-mana-lahan-sawit-terluas-di-indonesia>

dan tanaman industri yang tumbuh luas saat ini adalah kelapa sawit. Tanaman industri ini memiliki ikatan yang tidak terpisahkan dengan deforestasi Kalimantan Tengah. Sebagian besar hutan tropis dengan nilai pelestarian tinggi di Kalimantan Tengah telah dibuka untuk perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan api sebagai pendekatan yang lebih murah untuk membuka hutan untuk penanaman baru.

Kelapa sawit berkontribusi terhadap kerusakan ekologis yang lebih tinggi dan setidaknya memiliki empat dampak berbeda bagi lingkungan. Pertama, berkurangnya tutupan hutan dan di ganti dengan perkebunan kelapa sawit yang secara struktural kurang kompleks dibandingkan hutan alam (Danielsen, F. dan Heegaard, M. 1995). Kelapa sawit memiliki struktur umur pohon yang seragam, kanopi yang lebih rendah, semak yang jarang, iklim mikro yang kurang stabil (Peh, et al. 2006) dan merupakan jenis tanaman yang dibersihkan serta ditanam kembali dengan rotasi 25–30 tahun (Corley, RHV dan Tinker, 2003). Kelapa sawit juga memiliki kekayaan spesies yang jauh lebih rendah daripada hutan (Fitzherbert et.al, 2008; Koh dan Wilcove 2008; Danielsen et al. 2009). Setelah 30 tahun, tanah yang ditanami sawit akan terdegradasi dengan nutrisi yang lebih sedikit.

Kedua, Fitzherbert, et al. (2008) menyebutkan bahwa ekspansi kelapa sawit dapat berkontribusi terhadap deforestasi dalam empat cara: (i) dengan cara pembukaan hutan utuh; (ii) dengan mengganti hutan yang sebelumnya rusak karena penebangan atau kebakaran; (iii) sebagai bagian dari perusahaan ekonomi gabungan, seperti: keuntungan kayu, kayu lapis, atau bubur kertas yang digunakan untuk mengimbangi biaya pendirian perkebunan; atau (iv) secara tidak langsung, melalui peningkatan akses jalan untuk memindahkan tanaman lain ke hutan. Fitzherbert juga menyebutkan bahwa kelapa sawit juga memiliki kekayaan spesies

yang jauh lebih rendah daripada hutan bekas tebang. Penghapusan kawasan hutan telah mengakibatkan ketidakstabilan lingkungan ke habitat alami hutan. Kondisi ini mengakibatkan Orangutan, Harimau Sumatera dan Badak menghadapi kepunahan akibat menyusutnya hutan tropis dan dikonversi menjadi kelapa sawit (Tan, et al. 2007). Setiap konversi hutan alam pasti akan merusak keanekaragaman hayati. Kelapa sawit merupakan salah satu penyebab konversi hutan yang merusak di Kalimantan Tengah, perusakan habitat menyebabkan spesies terancam punah (Vijay. et.al, 2016), termasuk berdampak pula bagi orangutan yang telah hancur habitatnya. Orangutan adalah spesies kunci dan memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan ekosistem, namun saat ini Orangutan terkena dampak langsung deforestasi dan mengalami penurunan jumlah yang signifikan.

Ketiga, minyak sawit melepaskan polusi seperti emisi ke udara, tanah dan air limbah. Kelapa sawit menggunakan pupuk N yang diaplikasikan pada tanaman kelapa sawit di pembibitan maupun di perkebunan. Proses ini memancarkan N₂O ke atmosfer yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Pupuk ini juga dapat menambah kebocoran nitrat dan fosfat ke air tanah meskipun dampaknya masih perlu diteliti lebih lanjut (Pleanjai, S., Gheewala, S.H. Garivait, S., 2004). Polutan dari bahan kimia pertanian yang terkait dengan produksi minyak sawit (pupuk dan pestisida) memiliki dampak berbahaya pada ekosistem darat dan perairan. Limbah kelapa sawit, yang dicerna secara mikroba di kolam terbuka, sering meluap ke saluran air saat hujan deras (Petrenko, C., Paltseva, J., Searle, S. 2016) dan menyebabkan tercemarnya air yang di konsumsi masyarakat sekitar perkebunan. Penurunan kualitas air akan membuat penduduk setempat kesulitan mencari air bersih untuk minum dan mandi (Andrianto et.al 2014).

Keempat, Kalimantan Tengah secara

geografis ditutupi oleh hutan rawa gambut. Dibukanya perkebunan sawit menyebabkan pengeringan tanah organik kaya karbon ini berpotensi melepaskan emisi gas rumah kaca yang besar. Lebih dari 3 juta hektar lahan Kalimantan Tengah merupakan lahan gambut dan hampir 14% di antaranya telah menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit. Lahan gambut terluas berada di Kabupaten Katingan, Kahayan Hilir, Kapuas, Kotawaringin Timur dan Seruyan. Data Dinas Perkebunan Kalteng menunjukkan bahwa hingga tahun 2007 terdapat 20 perkebunan besar yang memperoleh izin beroperasi di atas 304.000 ha Kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) dan 17 di antaranya, yaitu sekitar 292.000 hektar merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit besar. Menurut kelompok lingkungan Greenpeace, lahan gambut Kalimantan Tengah sebagai hutan tropis yang unik dan terdiri dari tanah padat, sangat mudah terbakar dan melepaskan emisi karbon. Ini berarti, proses perusakan lahan gambut untuk pembukaan perkebunan sawit menyumbang emisi global tahunan.

3. Mekanisme Politik Dibalik Ekspansi Perkebunan Sawit di Kalimantan Tengah

Ekspansi kelapa sawit sangat terkait dengan isu-isu politik lokal, perubahan kebijakan, persaingan antar tingkat pemerintahan dalam pemberian konsesi kelapa sawit serta lemahnya penegakan hukum. Saat ini, minyak sawit telah menjadi kontributor signifikan bagi pasar dunia untuk minyak nabati dan biofuel. Perdagangan minyak sawit meroket karena permintaan global yang meningkat, dan profit yang tinggi telah mendorong investor untuk menaruh investasinya di industri kelapa sawit, yang pada akhirnya membutuhkan konversi lahan dalam pengembangannya.

Perkembangan industri kelapa sawit terjadi karena adanya hubungan antara

pemilik perkebunan besar dengan pemerintah yang menjadi penanggung jawab penerbitan izin. Interaksi antara kedua belah pihak menghasilkan keterlekatan hubungan ekonomi dan politik. Menurut Berenschot (2015), hubungan antara pemilik kelapa sawit dan elit lokal telah menghasilkan klientelisme yang kuat dalam siklus pemilihan daerah. Dominasi elite industri pertanian telah mengambil alih kekuasaan pilkada seperti di Kalimantan Tengah dimana perusahaan sawit, kayu, dan pertambangan memberikan dukungan dana dalam perebutan kekuasaan politik. Pada akhirnya, kekuatan yang diperoleh berfungsi untuk memperoleh lebih banyak konsesi perkebunan dan pertambangan (Berenschot, 2015). Pemilik perkebunan kelapa sawit membangun jejaring yang kuat dan merajai kekuasaan politik yang pada akhirnya menguasai sumber daya alam. Sifat hubungan yang mutual antara pengusaha sawit dan elit lokal memudahkan perluasan kebun sawit di Kalimantan Tengah.

Saling ketergantungan antara industri kelapa sawit yang kuat dengan politik lokal terlihat sejak pergeseran Suharto yang terpusat ke era otonomi daerah, di mana gubernur dan bupati memiliki kekuasaan yang besar. Salah satu contoh kontrol yang biasa dilakukan di tingkat kabupaten adalah kemampuan untuk menyewakan tanah dalam yurisdiksi Bupati kepada siapa pun yang mereka kehendaki. Kesepakatan antara Bupati dan perusahaan kelapa sawit telah memainkan peran penting dalam ledakan industri pertanian. Varkkey (2012) menyebutkan politik patronase di sektor sumber daya alam telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, merujuk pada pejabat pemerintah yang menerima imbalan dan gratifikasi untuk menerbitkan izin pengembangan perkebunan. Verkkey menggunakan perspektif ekonomi politik untuk mengeksplorasi sektor minyak sawit dan mengaitkan kabut asap lintas batas dan menemukan bahwa pengaruh regional dan

politik patronase terletak di jantung ekspansi industri sawit yang cepat. Ini berarti bahwa patronase politik lokal melegalkan perluasan perkebunan sawit yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan bencana asap yang terjadi di wilayah padat sawit seperti di Kalimantan Tengah.

Klientelisme dan Patronisme yang terjadi dalam industri sawit di Kalimantan Tengah sesungguhnya telah dimulai sejak kegagalan Suharto dalam pengelolaan hutan di Indonesia McCarthy (2000). Struktur relasi kepemilikan dan kekuasaan selama Orde Baru mendukung pengalokasian sumber daya alam untuk keluarga, teman konglomerat, dan kroni-kroninya. Selain itu, terlepas dari sistem patronase dan praktik klienisme, penegakan hukum menjadi prioritas terendah dalam usaha penyelamatan lingkungan, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum yang mengakibatkan lebih banyak birokrasi dan penuntutan yang tertunda (Herawati et al. 2011). Pemilik kelapa sawit swasta bekerjasama dengan petugas penegak hukum setempat dan mengizinkan perusahaan melanjutkan kegiatan pembukaan lahan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa profit dari ekspansi kelapa sawit telah digunakan untuk menghambat penegakan hukum dalam menindak kesalahan-kesalahan perusahaan sawit di lapangan.

Interaksi antara otoritas kehutanan dan kementerian pertanian regional dan nasional menciptakan kompetisi dalam proses pemberian konsesi. Kompetisi besar sedang terjadi antara pihak-pihak yang berwenang tentang siapa yang memiliki hak untuk memberikan konsesi atas apa dan seberapa luas, dengan demikian, siapa yang dapat memberikan konsesi maka akan mendapatkan keuntungan. Secara khusus, Kalimantan Tengah memiliki rencana tata ruang yang dibuat oleh kementerian kehutanan yang diperkirakan memiliki lebih banyak kawasan hutan agar kemungkinan pemberian konsesi kepada perusahaan dapat terus berlanjut. Di lain sisi, pemerintah daerah

merancang tata kelola perkebunan dengan menyediakan lebih banyak wilayah di luar hutan, karena dengan demikian pemerintah daerahlah yang berhak untuk memberikan konsesi. Namun saat ini kebebasan bupati untuk memberikan konsesi telah dibatasi dan dialihkan ke pemerintah provinsi. Sementara itu, perusahaan harus berkeliaran di antara semua otoritas ini. Pengusaha sawit sangat terdampak oleh proses perubahan kewenangan pemberian konsesi, namun tetap menjalin hubungan dengan otoritas di setiap level agar keberlangsungan perijinan tidak terkendala di tataran pemerintah pusat maupun daerah. Persaingan antara otoritas baik di aras lokal, provinsi dan nasional ini merupakan salah satu mekanisme dibalik perluasan perkebunan sawit yang berpotensi merusak lingkungan.

PENUTUP

Perluasan perkebunan kelapa sawit menimbulkan banyak masalah ekologi di Kalimantan Tengah. Dampak negatif lingkungan yang telah terdokumentasi adalah pemangkasan hutan yang mengakibatkan banyaknya area hutan yang hilang dan memicu deforestasi karena konversi hutan yang semakin meluas. Akibat lainnya adalah hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran air, dan erosi tanah. Ekspansi perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan juga berdampak pada perubahan lanskap ekologi dan perubahan tata guna lahan, perubahan tutupan lahan serta beberapa masalah lingkungan yang serius seperti penipisan unsur hara tanah serta meningkatnya emisi karbon akibat pemangkasan hutan dan emisi yang melekat pada pengolahan buah kelapa sawit. Semua akibat ekologi tersebut terjadi dilatarbelakangi oleh mekanisme 'dagang konsesi' di setiap level otoritas yang memberi ijin tanpa memperhatikan prosedur dan regulasi yang berlaku. Keterlekatan hubungan antara pengusaha dan elit lokal dalam pertukaran

antara ijin dan dukungan dalam pilkada juga telah menjadi salah satu penyebab meluasnya sawit dan berkurangnya tutupan hutan di Kalimantan Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto. A., Sedik, B.F., Waridjo, H., Komarudin, H., Obidzinski, K., 2014. The impact of oil palm plantation on forests and people in Papua. CIFOR.
- Austin, K.G, Mosnier, A., Pirker, J., McCallum, I., Fritz, S., Kasibhatla, P.S., 2017. Shifting patterns of oil palm driven deforestation in Indonesia and implications for zero-deforestation commitments. **Land Use Policy Volume 69**, December 2017, Pages 41-48
- Berenschot W. 2015. Haze of Democracy. Inside Indonesia 122, October to December 2015. <http://www.insideindonesia.org/haze-of-democracy>
- Bissonnette, J. De Koninck, R. 2015. Large Plantations Versus Smallholdings in Southeast Asia: Historical and Contemporary Trends, Land Grabbing, Conflict and Agrarian-environmental Transformations: Perspectives from East and Southeast Asia. Chiang Mai University (2015)
- Broich, M. et.al., 2011. Remotely Forest Cover Loss Shows High Spatial and Temporal Variation Across Sumatra and Kalimantan, Indonesia 2000 – 2008.
- Carlson KM, Curran LM, Asner GP, Pittman AM, Trigg SN, et al.. 2012. Carbon emission from forest conversion by Kalimantan oil palm plantations. *Nature Climate Change* doi: 10.1038/nclimate1702
- Danielsen, F. and Heegaard, M., 1995. Impact of logging and plantation development on species diversity: a case study from Sumatra. In *Management of Tropical Forests: Towards an Integrated Perspective* (Sandbukt, Ø., ed.), pp. 73–92, Centre for Development and the Environment, University of Oslo
- Danielsen, F., Beukema, H., Burgess, N.D., Parish, Z., Bruhl, C.A., Donald, P.F., Murdiyarso, D., Phalan, B., Reijnders, L., Struebig, M., & Fitzherbert, E.B. (2009). Biofuel plantations on forested lands: Double jeopardy for biodiversity and climate. *Conservation Biology*, 23(2), 348-358.
- Fitzherbert EB, Struebig M, Morel A, Danielsen F, Bruhl C, Donald PF, et al.(2008) How will oil palm expansion affect biodiversity? *Trends in Ecology and Evolution* 2008;23: 538–45
- Geist, H.J., Lambin, E.F., 2002. Proximate causes and underlying driving forces of tropical deforestation. *Bioscience* 52, 143–150.
- Hansen, M.C., Stephen, V.S., Peter, V.P., Belinda, A., Fred, S., Kyle, P., 2009. Quantifying changes in the rates of forest clearing in Indonesia from 1990 to 2005 using remotely sensed data sets. *Environmental Research Letters* 4, 34001.
- Herawati, H., Santoso, H., 2011. Tropical Forest Susceptibility to and Risk of Fire Under Changing Climate : A Review of Fire Nature, Policy and Institution in Indonesia, *Forest Policy and Economics*.
- Koh, L.P., Wilcove, D.S., 2008. Is oil palm agriculture really destroying tropical biodiversity? *Conservation Letters* 1 : 60-64
- McCarthy, J. F., and R. A. Cramb. 2009. Policy narratives, landholder engagement, and oil palm expansion on the Malaysian and Indonesian frontiers. *Geographical Journal* 175(2):112-113. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4959.2009.00322.x>
- McCharty, J, 2000. The Changing Regime: Forest Property and Reformasi in Indonesia, *Development and Change*.
- Margono, B.A., Potapov, P. V., Turubanova, S., Stolle, F., Hansen, M.C., 2014. Primary forest cover loss in Indonesia over 2000–

2012. *Nature Climate Change* 1–6.
- Margono, B.A., Turubanove, S., Zhuravleva, I., Potapov, P., Tyukavina, A., Baccini, A., Goetz, S., Hansen, M.C., 2012. Mapping and monitoring deforestation and forest degradation in Sumatra (Indonesia) using Landsat time series data sets from 1990 to 2010. *Environmental Research Letters* 7, 34010.
- Peh, K.S.H. et al., 2006. Conservation value of degraded habitats for forest birds in southern Peninsular Malaysia. *Divers.* 12, 572 – 581
- Petrenko, C., Paltseva, J., Searle, S., 2016. Ecological Impacts of Palm Oil Expansion in Indonesia. *International Council on Clean Transportation*. Washington.
- Pleanjai, S., Gheewala, S.H. Garivait, S., 2004. Environmental Evaluation of Biodiesel Production from Palm Oil in a Life Cycle Perspective. The Joint International Conference on “ Sustainable Energy and Environment (SEE) 1-3 December 2004. Huan Hin. Thailand
- Potter, L., 2008. The oil palm question in Borneo. In *Reflections on the Heart of Borneo* (Persoon, G. and Osseweijer, M., eds), Tropenbos International (in press)
- H Herawati, H Santoso. 2011. Tropical forest susceptibility to and risk of fire under changing climate: A review of fire nature, policy and institutions in Indonesia *Forest Policy and Economics* 13 (4), 227-233
- Prasetyo, L.B., Wijaya, C.I., Setiawan, Y., 2011. Spatial model approach for deforestation: Case study in Java Island, Indonesia. In: Y. Trisurat, R.P. Shrestha and R. Alkemade eds. *Land Use, Climate Change and Biodiversity Modeling: Perspectives and Applications*, pp. 376–387.
- Saxon, E. and S. Sheppard, 2010. Will Drivers of Deforestation Be Slowed by Indonesia’s Moratorium on New Forest Concessions? *Union of Concerned Scientists*.
- Setyawan, A.D 2010. Review: Biodiversity conservation strategy in a native perspective : case study of shifting cultivation at the Dayaks of Kalimantan
- Smith, J.; Obidzinski, K.; Subarudi, Subarudi; Suramenggala, I.** 2003. Illegal logging, collusive corruption and fragmented governments in Kalimantan, Indonesia. **International Forestry Review**, Volume 5, Number 3, September 2003, pp. 293-302(10)
- Sunderlin, W.D., Resosudarmo, I.A.P. 1996. Rates and causes of deforestation in Indonesia: towards a resolution of the ambiguities. *CIFOR Occasional Paper* No.9.
- Susanti, A. Maryudi, A. 2016. Development narratives, notions of forest crisis, and boom of oil palm plantation in Indonesia. *Forest Policy and Economics*. 130-139
- Suwarno, A., Hein, L., and Sumarga, E. 2015. Who Benefits from Ecosystem Services? A Case Study for Central Kalimantan, Indonesia. *Environmental management*. Springer.
- Tan, K.T., Lee, K.T., Mohamed, A.R., Bhatia, S. 2007. Palm oil : Addressing issues and towards sustainable development. *Renewable & Sustainable Energy Reviews*. Elsevier
- Varkkey, H., 2012. Patronage politics as a driver of economic regionalisation: The Indonesian oil palm sector and transboundary haze. *Asia Pacific Viewpoint* 53 (3), 314-329
- Vijay, V., Pimm, S.L., Jenkins, C.N., Smith, S.J. 2016. The Impacts of Oil Palm on Recent Deforestation and Biodiversity Loss. *PLOS Journal*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0159668>
- Wakker E. 2005. *Greasy Palms: The Social and Ecological Impacts of Large Scale Oil Palm Plantation in Southeast Asia*. London: Friends of the Earth.
- Wijaya, A., R. Sugardiman, A. Tosiani Budiharto, D. Murdiyarto, and L. V. Verchot. 2015. *Assessment of Large Scale Land Cover Change Classifications and*

Drivers of Deforestation in Indonesia.”
Proceedings of the 36th International
Symposium on Remote Sensing of
Environment, <http://toc.proceedings.com/33024webtoc.pdf>.